

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aminanto, Kif, 2017, *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*, Jember

Katamedia, Jember.

Dirdjosisworo, Soedjono 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.

Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Miru, Ahmadi dan **Yodo**, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nasution, Az., 1995, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Moleong. L. J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3

Riswandi, Budi Agus, 2005, *Apek Hukum Internet Banking*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta

Shofie, Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shofie, Yusuf dan **Awan**, Somi, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen: Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Piramedia, Jakarta.

Wright, Benjamin & Winn Jane K., 2000, *The Law of Electronic Commerce*, New York: Aspen Law & Business.

SKRIPSI/PENELITIAN/JURNAL

Samsul, Inosentius, “*Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*”, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004, hal-227

Pamono, Nindyo, “*Beberapa Aspek Penting Terkait dengan Pengembangan Konsentrasi Hukum Bisnis Dalam Era Global*”, Makalah, Workshop Program Ilmu Doktor pada Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1 November 2000.

Serfiyani, Yustisia dan **Iswi**, Hariyani, “*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*”, Buletin Hukum Kebanksentralan Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Subari, S. M. T., “*Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*”, buku Seri Kebanksentralan No.8, 2017

Yogapramudita, Budi, “*Tinjauan Yuridis Tentang Uang Elektronik di Indonesia*”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015

Nur, Yudha Hadian dan **Prabowo**, Dwi Wahyuniarti, “*Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Volume 5, Nomor 2, Desember 2011

MAKALAH/PIDATO/KORAN

Manan, Bagir, Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, *Makalah*, Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 15 Maret 1997

LinkAja, LinkAja Uang Elektronik Nasional yang Praktis dan Inovatif, Kompas, 1 Juli 2019, hlm. 5

INTERNET

Author, “Pengertian Gagal Bayar”, <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/08/pengertian-gagal-bayar.html>, diakses 29 September 2019.

Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran di Indonesia “, https://www.bi.go.id/id/sistem_embayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx, diakses 16 Januari 2019.

Bank Indonesia, “Fungsi Bank Indonesia “, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>, diakses 20 Juni 2019

Bank Indonesia, “Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan”, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>, diakses 29 September 2019.

Bank Indonesia, “Operasi Pasar Terbuka“, <https://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/operasi-pasar-terbuka/Contents/Default.aspx>, diakses 29 September 2019.

Bank Indonesia, “Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang di Indonesia”, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perkembangan/Contents/Default.aspx>, diakses 30 September 2019.

Bank Indonesia, “Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran “, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perlindungan/Contents/Default.aspx>, diakses 5 Oktober 2019.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Tentang BPKN“, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1>, diakses 15 September 2019.

CNN Indonesia, “OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dai China“, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181212154013-78-353131/ojk-tutup-lapak-404-fintech-ilegal-kebanyakan-dari-china>, diakses 22 Januari 2019

CNN Indonesia, “Bukalapak Akui Ada Upaya Peretasan Akun Pengguna”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190318115724-185-378279/bukalapak-akui-ada-upaya-peretasan-akun-pengguna>, diakses 21 September 2019

Detik News, “Pembayaran E-Money di Tol Digugat Warga Bogor ke MK“, <https://news.detik.com/berita/3715565/pembayaran-e-money-di-tol-digugat-warga-bogor-ke-mk/>, diakses 23 Januari 2019

- Detik News**, “MK Sahkan E-Money sebagai Alat Pembayaran“, <https://news.detik.com/berita/d-3890836/mk-sahkan-e-money-sebagai-alat-pembayaran>, diakses 23 Januari 2019
- Duhaime.org**, “Privacy Definition”, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/P/Privacy.aspx>, diakses 24 September 2019.
- Faris, M.**, “5 Examples of Mobile Payment”, <https://www.walletpath.com/5-examples-of-mobile-payments/>, diakses 14 Januari 2019
- Fajar Sidik**, “Mengapa Bank Indonesia Melarang Virtual Currency? Ini Penjelasannya”, <https://finansial.bisnis.com/read/20180118/11/727950/mengapa-bank-indonesia-melarang-virtual-currency-ini-penjelasannya>, diakses 13 September 2019
- Fiki Ariyanti**, “Mantul, Transaksi Jual Beli Bitcoin Sudah Legal di Indonesia“, <https://www.cermati.com/artikel/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia>, diakses 31 September 2019.
- Komisi Informasi Provinsi Banten**, “Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi”, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.XYo8p0Yza00>, diakses 25 Februari 2019.
- Lalu Rahadian**, “Penipuan Kartu Kredit Kembali Terjadi, Sudah Amankah Data Anda?”, <https://finansial.bisnis.com/read/20190314/90/899721/penipuan-kartu-kredit-kembali-terjadi-sudah-amankah-data-anda>, diakses 21 September 2019.
- LPS PBJP**, “Apa Perbedaan Antara Mediasi dan Konsiliasi ?“, <https://sielsa.lkpp.go.id/faq/16/apa-perbedaan-antara-mediasi-dan-konsiliasi>, diakses 26 September 2019.
- Noviyanto**, “Seluk Beluk, Definisi Fintech dan Manfaatnya “ <https://koinworks.com/blog/definisi-fintech-dan-manfaatnya/>, diakses 19 Juni 2019
- Oktaviano Donald Baptista dan Fitri Satrina Dewi**, “Ardiansyah Parman: Beri BPKN Wewenang Menindak” <https://finansial.bisnis.com/read/20180809/9/826089/ardiansyah-parman-beri-bpkn-wewenang-menindak>, diakses 16 September 2019
- Pical Gadi**, “Yuk Kenalan dengan Makroprudensial dan Perannya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan “, <https://www.kompasiana.com/picalgadi/5d122d7b097f3636124f3dc2/yuk->

kenalan-dengan-makroprudensial-dan-perannya-menjaga-stabilitas-sistem-keuangan?page=all, diakses 30 September 2019.

Scott-Briggs, Angela, “*What is Digital Payment, origin and history in Financial Technology*“, <https://www.techbullion.com/what-is-digital-payment-origin-and-history-in-financial-technology/>, diakses 14 Januari 2019

SmartLegal.id, “Apa Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia ?“, <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/perindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>, diakses 16 September 2019 .

Sovia Hasanah, “Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt596c19fed3ca7/perbedaan-konsiliasi-dengan-arbitrase-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial>, diakses 26 September 2019.

Yanurisa Ananta, “LinkAja Tantang OVO & GoPay, Ini Penjelasan Resmi BUMN “, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190212170723-37-55124/linkaja-tantang-ovo-gopay-ini-penjelasan-resmi-bumn>, diakses 17 September 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10 DKSP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA APLIKASI TEKNOLOGI KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY) YANG BERBASIS PEMBAYARAN DI INDONESIA.

DIOKHRISNA BAYU N, Hariyanto, S.H., M.Kn.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>